



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**RENCANA KERJA TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga atas berkah dan rahmatNya, Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini, merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 diharapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur

Jayapura, Oktober 2020

**Kepala Biro,**



**YOREM B. WANIMBO, SPi, MM**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19700118 199203 1 006**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....   | i         |
| DAFTAR ISI.....  | ii        |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 3         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | 4         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN<br/>BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN<br/>2019</b> .....         | <b>5</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun<br>2021.....  | 6         |
| 2.2. Analisa Kinerja Tahun 2019 .....  | 7         |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Biro<br>Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun<br>2019 ..... | 11        |
| 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 .....  | 12        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>   | <b>21</b> |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....  | 21        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat<br>Daerah.....   | 22        |
| 3.3. Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan.....  | 22        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>   | <b>27</b> |

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pelayananan pengadaan barang dan jasa sebagaimana prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan guna menjamin tercapainya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terbuka, transparan, akuntabel dan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua maka diperlukan suatu perencanaan yaitu Rencana Kerja Tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi dan dapat menjawab visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Papua.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otomomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, tahun 2019-2023.
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai Dukumen Perencanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 yaitu :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program,kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021.

2. Sebagai sarana pengendalian progra dan kegiatan Tahun 2021;
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021 sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** yang memuat uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU** yang memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun n-1, analisa kinerja tahun n-1, isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

**BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN** memuat tujuan dan sasaran Renja dan program kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021.

**BAB IV PENUTUP**

## BAB. II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019 terealisasi berupa realisasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

Realisasi Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021

| Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target 2019                        |                                      | Capaian (%)          |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   |  | Target                             | Realisasi                            |                      |
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran                      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran  | 12 Bulan<br>(Rp. 7.827.367.400,-)  | 12 Bulan<br>(Rp. 6.831.434.595,-)    | 100,00<br>(87,28)    |
| Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan                           | Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana perkantoran                                 | 12 Bulan<br>(Rp. 1.695.000.000,-)  | 12 Bulan<br>(Rp. 1.513.685.122,-)    | 100%<br>(89,30)      |
| Tercapainya peningkatan disiplin aparatur                                     | Cakupan SDM aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur                      | 370 Stel<br>(Rp. 300.000.000)      | 370 Stel<br>(Rp. 298.939.590)        | 100<br>(99,65)       |
| Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompetensi dan profesional | Cakupan SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek barang/jasa                                   | 120 Orang<br>(Rp. 5.116.755.000,-) | 120 Orang<br>(Rp. 3.920.798.275,-)   | 100<br>(76,63)       |
|   | Cakupan SDM Aparatur yang mengikuti Diklat PIM   | 2 Orang<br>(Rp. 70.000.000,-)      | 0 Orang<br>(Rp. 0,-)                 | 0<br>(0,00)          |
|   | Cakupan SDM Pengusaha OAP yang mengikuti Sosialisasi                                     | 800 Orang<br>(Rp. 1.500.000.000,-) | ..... Orang<br>(Rp. 1.463.065.530,-) | .....<br>(Rp. 97,54) |
| Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik           | Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu                      | 12 Bulan<br>(Rp. 255.000.000,-)    | 12 Bulan<br>(Rp. 75.000.000,-)       | 100<br>(29,41)       |
| Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                               | Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta profesionalisme: | 1 Tahun<br>(Rp. 26.735.877.600,-)  | 1 Tahun<br>(Rp. 25.520.421.991,-)    | 100<br>(95,45)       |
|   | - Terlaksananya pemilihan penyedia barang/jasa   | 12 Bulan                           | 12 Bulan                             | 100                  |
|   | - Terlaksananya Penyusunan SOP   | 1 Kegiatan                         | 1 Kegiatan                           | 100                  |
|   | - Terlaksananya survei harga   | 1 Kegiatan                         | 1 Kegiatan                           | 100                  |
|   | - Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                 | 2 Kegiatan                         | 2 Kegiatan                           | 100                  |

Capaian kinerja utama Biro layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua di tahun 2019 ditargetkan Tender/Seleksi barang dan jasa pemerintah sebanyak 460 paket dengan realisasi jumlah paket yang masuk pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebanyak 446 paket

Rincian mengenai paket lelang yang telah tuntas dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.2.**

Data Realisasi Tender/Seleksi pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019 berdasarkan Jenis Pengadaan

| No     | Jenis Pengadaan      | Jumlah Paket | Pagu (Rp)            | HPS (Rp)             | Kontrak (Rp)         | Efisiensi (Rp)     |
|--------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1      | Barang               | 46           | 149.772.786.957,00   | 143.292.961.719,35   | 135.329.092.704,44   | 7.963.869.014,91   |
| 2      | Jasa Lainnya         | 6            | 138.048.622.000,00   | 118.298.668.210,00   | 116.586.086.457,21   | 1.712.581.752,79   |
| 3      | Jasa Konsultansi     | 173          | 123.409.388.439,00   | 113.309.548.758,70   | 105.603.391.257,92   | 8.160.191.340,38   |
| 3      | Pekerjaan Konstruksi | 221          | 2.387.767.037.147,00 | 2.365.253.701.630,91 | 2.232.518.652.529,64 | 132.735.049.101,27 |
| JUMLAH |                      | 446          | 2.798.997.834.543,00 | 2.740.154.880.318,96 | 2.590.037.222.949,21 | 150.571.691.209,35 |

Berdasarkan data diatas, dalam tahun 2019 Biro Layanan Pengadaan dapat mengefisiensikan anggaran sebesar Rp. 150.571.691.209,35 (Seratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus Sembilan koma tiga puluh lima rupiah) untuk anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Papua dari 446 paket yang selesai ditenderkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

## 2.2. ANALISA KINERJA TAHUN 2019

### 2.2.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019

Kinerja Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Biro Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2019 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2019 dengan realisasinya, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dengan komponen sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategi (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk tahun berjalan yaitu tahun 2019 dengan hasil sesuai Tabel 2.1 diatas.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019**

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | CAPAIAN 2019 |           |
|-----|---|--|--------------|-----------|
|     |   |  | TARGET       | REALISASI |
| 1.  | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran                        | Persentase Realisasi Program dan Anggaran yang sesuai dengan Perencanaan | 100 %        | 89,84 %   |
| 2.  | Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel | Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu                     | 100 %        | 100 %     |
| 3.  | Terwujudnya pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai kaidah/prinsip-prinsip PBJ            | Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa melalui e-procurement      | 100 %        | 100 %     |
|     |   | Rata – Rata Penghematan anggaran melalui e-procurement                   | 10 %         | 5,5 %     |
| 4.  | Terwujudnya penyelesaian sengkahan dan pengaduan  | Persentase sengkahan yang diselesaikan                                   | 100 %        | 100 %     |

### 2.2.2. Realisasi Keuangan Tahun 2019

Aspek keuangan sangatlah berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun anggaran 2019 pagu anggaran Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yang bersumber dari APBD Provinsi Papua sebesar **Rp. 29.892.553.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)** yang telah direvisi melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD Tahun 2019 menjadi **Rp 48.504.450.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 5.004.450.000,- (Lima Milyar Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 43.500.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

Realisasi Keuangan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) baik Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) secara keseluruhan mencapai Rp. 43.577.755.063,- (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 89,84% dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 48.504.450.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2019, dapat disajikan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Langsung

Berdasarkan DPPA-SKPD Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019, dapat diuraikan pembiayaan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4.**  
Belanja Langsung Tahun 2019

| <b>N<br/>O</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>PAGU<br/>ANGGARAN<br/>(Rp)</b> | <b>REALISASI<br/>ANGGARAN</b> | <b>%</b>     |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>1.</b>      | <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran</b>                                 | <b>7.827.367.400,-</b>            | <b>6.831.434.595,-</b>        | <b>87,28</b> |
|                | 1 Penyediaan jasa surat menyurat  | 632.000.000,-                     | 428.026.000,-                 | 67,73        |
|                | 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | 120.000.000,-                     | 111.362.800,-                 | 92,80        |
|                | 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 691.517.400,-                     | 652.714.135,-                 | 94,39        |
|                | 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 580.000.000,-                     | 537.748.000,-                 | 92,72        |
|                | 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | 398.000.000,-                     | 376.262.980,-                 | 94,54        |
|                | 6 Penyediaan Makanan dan Minuman  | 1.680.000.000,-                   | 1.594.637.900,-               | 94,92        |
|                | 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dalam daerah                    | 3.395.850.000,-                   | 2.800.682.780,-               | 82,47        |
|                | 8 Penyediaan Jasa Pengamanan  | 330.000.000,-                     | 330.000.000,-                 | 100,00       |
| <b>2.</b>      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>1.695.000.000,-</b>            | <b>1.513.685.122,-</b>        | <b>89,30</b> |
|                | 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | 60.000.000,-                      | 50.779.504,-                  | 84,63        |
|                | 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor   | 550.000.000,-                     | 541.750.000,-                 | 98,50        |
|                | 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | 160.000.000,-                     | 70.000.000,-                  | 43,75        |
|                | 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                             | 234.000.000,-                     | 172.208.118,-                 | 73,59        |
|                | 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                               | 121.000.000,-                     | 120.982.000,-                 | 99,99        |
|                | 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor                                       | 570.000.000,-                     | 557.965.500,-                 | 97,89        |
| <b>3.</b>      | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>300.000.000,-</b>              | <b>298.939.590,-</b>          | <b>99,65</b> |
|                | 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya                                     | 300.000.000,-                     | 298.939.590,-                 | 99,65        |
| <b>4.</b>      | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>6.686.755.000,-</b>            | <b>5.383.863.805,-</b>        | <b>80,52</b> |
|                | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 70.000.000,-                      | 0,-                           | 0,00         |
|                | 2 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa   | 5.116.755.000,-                   | 3.920.798.275,-               | 76,63        |
|                | 3 Pendampingan Pengusaha OAP  | 1.500.000.000,-                   | 1.463.065.530,-               | 97,54        |
| <b>5.</b>      | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>255.000.000,-</b>              | <b>75.000.000,-</b>           | <b>29,41</b> |

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2021**

|           |   |  |                         |                         |              |
|-----------|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
|           | 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.000.000,-            | 0,-                     | 0,00         |
|           | 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                 | 20.000.000,-            | 10.000.000,-            | 50,00        |
|           | 3 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran                      | 20.000.000,-            | 0,-                     | 0,00         |
|           | 4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                              | 35.000.000,-            | 0,-                     | 0,00         |
|           | 5 | Penyusunan RENJA, RKA dan Perubahan APBD                               | 150.000.000,-           | 65.000.000,-            | 58,82        |
| <b>6.</b> |   | <b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>                     | <b>26.735.877.600,-</b> | <b>25.520.421.991,-</b> | <b>95,45</b> |
|           | 1 | Pendampingan Hukum dan Sanggah   | 916.042.600,-           | 252.241.340,-           | 27,54        |
|           | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                      | 1.534.510.000,-         | 1.182.947.345,-         | 77,09        |
|           | 3 | Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa                            | 24.285.325.000,-        | 24.085.233.306,-        | 99,18        |
|           |   | <b>TOTAL</b>   | <b>43.500.000.000,-</b> | <b>39.623.345.103,-</b> | <b>91,09</b> |

|                            |   |                               |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Pagu Dana                  | : | Rp 43.500.000.000,-           |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp 39.623.345.103,- (91,09 %) |
| Sisa Dana Disetor/SPD Mati | : | Rp 3.876.654.897,- (8,91 %)   |

Dari tabel capaian kinerja program diatas, nampak bahwa dari 6 program yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa , terdapat 5 program baik capaian kinerja fisik maupun anggaran menunjukkan kategori sangat tinggi (ST) sedangkan 1 program pencapaiannya Sangat Rendah (SR), yaitu Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja keuangan. Namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kriteria penilaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan jasa dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan demikian pencapaian target/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat memenuhi target.

## 2. Belanja Tidak Langsung

Adapun Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Pagu Dana : Rp 5.004.450.000,-

Realisasi Keuangan : Rp 3.954.409.960,- (79,02 %)  
Sisa Dana per 31 Desember 2019 : Rp 1.050.040.040,- (20,98 %)

### **2.3. ISU-ISU PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2019**

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai berikut:

- 1) Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang baru terbentuk pada tahun 2020, kualitas SDM dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan di lingkup pengadaan barang dan jasa belum optimal.
- 2) Biro PBJ belum didukung dengan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PF PPBJ), saat ini Biro PBJ hanya didukung oleh Kelompok Kerja dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang masih bersifat Ad Hoc.
- 3) Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- 4) Belum memadainya SDM pengelola PBJ, sarana prasarana termasuk akses jaringan internet.
- 5) Data pengusaha lokal atau Orang Asli Papua (OAP) belum terintegrasi dengan SPSE dan Aplikasi perencanaan dan penganggaran.
- 6) Belum terpenuhinya standarisasi LPSE yang berpengaruh pada pencapaian tingkat kematangan UKPBJ.

### **2.4. RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**

Sesuai Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 yang merupakan tahapan ke tiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dimana sesuai kondisi kondisi yang sedang berlangsung (existing condition) dalam

pembangunan yang tengah dilakukan. Terkait kondisi yang sedang berlangsung permasalahan yang sedang dihadapi adalah merebahnya wabah Covid-19 yang sampai hari ini belum bisa diatasi dengan maksimal. Perumusan tema pembangunan nasional pun mengalami pergeseran yang tadinya **“Meningkatkan Industri, Pariwisata Dan Investasi Di Berbagai Wilayah Didukung Oleh SDM, Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”**. Rumusan tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 pun juga mengalami penyesuaian, semula **“Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan”**, menjadi : **Pemulihan Kehidupan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Hidup, Dan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.**

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan RENJA 2021 telah ditampung semuanya dalam RKPD, Oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan baik penambahan maupun penghapusan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.5 berikut :

### ***2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat***

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang merupakan salah satu unit kerja administratif yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang pengadaan barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi hanya bersifat administratif baik dalam bentuk fasilitasi, monitoring dan evaluasi maupun perumusan kebijakan, sehingga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan tidak secara langsung menampung usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah lainnya.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah**

#### **3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka perlu penyalarsan Arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Papua khususnya berkaitan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2015-2019 telah dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang

mana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu penyelarasan dengan arah kebijakan nasional dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan peningkatan keadilan, transparansi dan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Kementerian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

### ***3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah***

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2021 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Papua sebesar Rp. **31,240,830,110**. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 serta prakiraan maju Tahun 2023 seperti yang tersaji pada tabel 3.1 berikut ini :

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Prakiraan Strategis (RENSTRA) dan Prakiraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua (RPJMD) tahun 2019-2023 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua pada Tahun 2021.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Jayapura, Oktober 2020

**Kepala Biro,**



**YOREM B. WANIMBO, Spi, MM**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19700118 199203 1 006**